



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KESEHATAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **JEFFRI ARDIYANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **675552**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.830.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.005.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 478.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 757.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **464.000.000**

1. MOBIL, HONDA MPV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS TERIOS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOTOR, HONDA VIJO2032LO A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, VESPA VESPA SPRINT IGET 150 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. MOTOR, HONDA HIBO2N41LO A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
7. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RUI 1,5 E PLUS CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	900.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	630.220.521
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.824.220.521
III. HUTANG	Rp.	260.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.564.220.521

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.